

Katalog: 4102002.6474

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

KOTA BONTANG
2017



BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BONTANG



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

KOTA BONTANG
2017

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA BONTANG 2017 (METODE BARU)

ISBN: 978-602-5502-14-9

No. Publikasi: 64740.1809

Katalog : 4102002.6474

Ukuran Buku: 14,5 cm x 21 cm

Jumlah Halaman: x + 51 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kota Bontang

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kota Bontang

Desain Cover:

Badan Pusat Statistik Kota Bontang

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik Kota Bontang

Dicetak oleh:

CV. Suvi Sejahtera

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Kebutuhan konsumen akan data statistik makin kompleks khususnya untuk data sosial-ekonomi penduduk. Untuk memenuhi data tersebut Badan Pusat Statistik Kota Bontang telah menerbitkan publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2017 secara periodik tahunan.

Publikasi ini merupakan indeks komposit yang memberi gambaran menyeluruh mengenai pembangunan manusia. Disebut indeks komposit karena mencakup indikator dibidang pendidikan, kesehatan dan daya beli (pengeluaran) masyarakat. Data yang digunakan untuk menganalisis dua hal tersebut di atas adalah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Tahun 2017 yang dilaksanakan dalam 2 (dua) semester.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga terbitnya publikasi ini diucapkan banyak terima kasih. Saran dan kritik yang membangun kami harapkan untuk perbaikan publikasi berikutnya.

Bontang, Desember 2018
Plt. Kepala BPS Kota Bontang



Wembri Suska, S.ST, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	3
1.3 Fungsi, Lingkup dan Keterbatasan	4
BAB 2 FORMULA DAN METODE PERHITUNGAN.....	7
2.1 Pengukuran IPM	7
2.1.1. Angka Harapan Hidup (e0)	14
2.1.2. Rata-rata Lama Sekolah (MYS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (EYS)	15
2.1.3. Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (PPP)	17
2.1.4. Pertumbuhan IPM	18
2.2 Definisi Operasional Indikator Terpilih	20
BAB 3 GAMBARAN UMUM KOTA BONTANG	25
3.1 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk.....	25
3.2 Keadaan Kesehatan	26
3.3 Tingkat Pendidikan.....	27
3.4 Keadaan Ketenagakerjaan	28
3.5 Fasilitas Perumahan.....	29

3.6 PEREKONOMIAN	30
BAB 4 PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PERBANDINGAN	
ANTAR DAERAH	35
4.1 Pencapaian Pembangunan Manusia.....	36
4.1.1 Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat.....	38
4.1.2 Dimensi Pengetahuan	39
4.1.3 Dimensi Standar Hidup Layak	41
4.2 Perbandingan Pembangunan Manusia Antar	
Kabupaten/Kota Di Kalimantan Timur	42
BAB 5 PENUTUP	45
5.1 Kesimpulan.....	45
5.2 Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	51

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Indikator IPM.....	13
Tabel 2.2. Kriteria Status Pembangunan Manusia.....	14
Tabel 2.3. Konversi Tahun menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah (MYS).....	16
Tabel 3.1. Perkembangan dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang, 2011-2017	32
Tabel 4.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bontang Menurut Komponen, 2010-2017	37
Tabel 4.2. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur, 2016-2017.....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Perubahan Metodologi IPM	9
Gambar 2.2.	Tahapan Penghitungan Pengeluaran Riil Disesuaikan	17
Gambar 2.3.	Penghitungan Paritas Daya Beli (dihitung dari bundel komoditas makanan dan non makanan).....	18
Gambar 3.1.	Angka PDRB Per Kapita/Tahun Kota Bontang (Juta Rp).....	33
Gambar 4.1.	Usia Harapan Hidup Sejak Lahir (UHH) Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia, 2010-2017.....	38
Gambar 4.2.	Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia, 2010- 2017 (Tahun)	39
Gambar 4.3.	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia, 2010- 2017 (Tahun)	40
Gambar 4.4.	Konsumsi Per Kapita Per Tahun Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia (Ribu Rupiah), 2010-2017.....	42

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Belakangan ini, perhatian kita terfokus pada isu pertumbuhan ekonomi, pelaksanaan reformasi ekonomi, dan nawacita, terhadap dimensi pembangunan manusia. Hal terakhir muncul sebagai salah satu isu sehubungan dengan tujuan pembangunan yang dinilai kurang berorientasi pada aspek manusia dan hak-hak azasinya. Hal ini tercermin pada perkembangan pemikiran tentang paradigma pembangunan di dunia selama beberapa dekade terakhir. Pada dekade 60-an, pembangunan berorientasi pada peningkatan produksi (*production centered development*) dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi bukanlah akhir dari tujuan pembangunan, tetapi hanya sebagai alat/cara untuk mencapai tujuan yang lebih esensial yaitu *human security*.

Dalam kerangka pemikiran ini, manusia tidak ditempatkan sebagai faktor variabel, tetapi hanya sebagai faktor produksi. Kemudian pada dekade 70-an paradigma pembangunan bergeser dengan lebih menekankan pada distribusi hasil-hasil pembangunan (*distribution growth development*). Selanjutnya muncul paradigma pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need development*) pada dekade 80-an, dan memasuki tahun 90-an paradigma

pembangunan terpusat pada aspek manusia (*human centered development*). Upaya untuk mengangkat manusia sebagai tujuan utama pembangunan, sebenarnya telah muncul dengan lahirnya konsep “*basic need development*”. Paradigma ini mengukur keberhasilan pembangunan dengan menggunakan Indeks Mutu Hidup (*Physical Quality of Life Index*), yang memiliki tiga parameter yaitu angka kematian bayi, angka harapan hidup waktu lahir dan tingkat melek huruf. Kemudian dengan muncul dan berkembangnya paradigma baru pembangunan manusia, sejak tahun 1990 UNDP menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)* untuk mengukur keberhasilan atau kinerja pembangunan manusia suatu negara atau wilayah. Sejalan dengan itu, perlu dilakukan pengukuran kinerja pembangunan di wilayah Kota Bontang, dan selanjutnya metodologi perhitungannya berubah dengan 2 alasan yaitu: beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam perhitungan IPM, angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf disebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

Menggunakan rumus rata-rata aritmetik dalam penghitugn IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

1.2 TUJUAN

Berdasarkan Permendagri No. 4 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah (Poldas), IPM dipakai untuk melihat kondisi dan potensi pembangunan daerah melalui pendekatan pembangunan manusia. IPM merupakan indeks komposit yang diharapkan mampu mencerminkan perbandingan kinerja pembangunan manusia di suatu daerah, khususnya di Kota Bontang tahun 2017.

Penghitungan indeks pembangunan manusia sampai ke tingkat kabupaten/kota sangat penting, mengingat proses desentralisasi (otonomi daerah) yang sedang berjalan di Indonesia saat ini yang tentunya terjadinya pemindahan sebagian besar proses pembangunan dari pemerintah pusat ke tangan pemerintah daerah dan masyarakat lokal. Untuk itu tentunya dibutuhkan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi setempat (pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan ekonomi) dengan dukungan data-data yang lebih memadai untuk kabupaten/kota yang bersangkutan.

Penghitungan IPM 2017 merujuk pada rekomendasi UNDP tentang penghitungan IPM Metode Baru 2010, sehingga akan memberikan gambaran yang lebih terarah pada keadaan pembangunan manusia terkini di kota Bontang. Penghitungan IPM 2017 juga berguna untuk melihat capaian pembangunan manusia di Kota Bontang pada tahun 2017 dan juga sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dan perumusan arah kebijakan oleh pemerintah, sehingga

diharapkan kebijakan yang diambil akan lebih terarah pada peningkatan kualitas hidup masyarakat untuk mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya.

1.3 FUNGSI, LINGKUP DAN KETERBATASAN

IPM adalah indeks komposit yang diharapkan mampu mencerminkan kinerja pembangunan manusia yang dapat dibandingkan antar wilayah dan antar waktu. IPM mencoba menggambarkan pembangunan manusia atau mutu hidup ke dalam suatu angka indeks. Merupakan suatu kemustahilan jika pembangunan manusia dalam arti luas dapat diukur hanya dengan suatu indeks komposit, tak peduli berapa banyak komponen indikatornya (apalagi mengingat bahwa makin banyak variabel yang dimasukkan ke dalam indeks komposit, makin besar pula kemungkinan *error* yang dapat ditimbulkan).

IPM juga masih memiliki kelemahan lain yaitu dari segi data dan arti. Dari segi data, kelemahannya terletak pada definisi/konsep dan kualitas data yang digunakan antar daerah maupun antar negara sangat beragam, sehingga mengurangi kekuatan IPM sebagai alat banding di tingkat internasional. IPM juga membutuhkan indikator yang kuantitatif, sehingga untuk beberapa hal IPM mempunyai kelemahan karena tidak mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan output ketiga komponen di sebuah negara berkembang. Kelemahan lain yang bersifat umum dari suatu indeks komposit adalah tidak memiliki arti tersendiri secara individual.

Akan tetapi di balik kelemahannya, fungsi IPM sebagai sarana untuk menarik perhatian masyarakat terhadap masalah pembangunan manusia telah diakui secara luas. *Statistical Institute for Asia and The Pasific* (SIAP) merekomendasikan negara anggotanya untuk menghitung IPM sebagai alat perbandingan antar wilayah di dalam suatu negara, karena pada umumnya definisi/konsep sistem perstatistikan wilayah-wilayah dalam satu negara relatif sama sehingga kualitas data yang dihasilkan pun sama.

Setelah diperkenalkannya IPM pada tahun 1990, pada tahun 1995 UNDP memperkenalkan dua jenis indeks pembangunan manusia yang berkaitan dengan gender yaitu (1) *Gender Related Development Index* (GDI) atau indeks pembangunan gender (IPJ); dan (2) *Gender Emporment Measure* (GEM) atau indeks pemberdayaan gender (IDJ). IPJ seperti halnya IPM merupakan suatu indeks komposit yang diharapkan dapat merefleksikan capaian upaya keseluruhan pembangunan manusia. Berbeda dengan IPM, penghitungan IPJ memperhatikan ketidaksamaan gender. Telah diakui secara luas bahwa suatu faktor krusial bagi keberhasilan upaya pembangunan manusia adalah pemberdayaan gender. Sebagai upaya agar faktor tersebut dapat dilihat maka UNDP mengembangkan IDJ. Indeks komposit ini menggunakan variabel yang secara eksplisit mengukur pemberdayaan relatif laki-laki dan wanita dalam wilayah aktivitas politik dan ekonomi.

IPM dan ukuran-ukuran lain yang telah dikemukakan digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia secara rata-rata, tetapi tidak mengukur kesenjangan manusia (*human deprivations*).

Untuk mengisi kesenjangan ini, pada tahun 1997 UNDP memperkenalkan indeks kemiskinan manusia (IKM) atau *Human Poverty Index* (HPI). Indeks ini mencoba mengungkap deprivasi yang terjadi. Komponen IKM adalah (1) persentase penduduk yang tidak mampu bertahan hidup (meninggal) hingga umur 40 tahun sebagai refleksi dari deprivasi hidup sehat dan panjang umur; (2) persentase penduduk dewasa yang buta huruf sebagai refleksi dari deprivasi di bidang pendidikan (dalam IPM metode baru 2010 menjadi pencapaian tingkat pendidikan), dan (3) akses kepada pembangunan kesehatan, air bersih dan persentase balita yang kurang gizi. Indeks komposit dari ketiganya mewakili deprivasi dari keseluruhan yang terkait dengan ekonomi. Bila IPM mengukur pencapaian rata-rata pada setiap komponennya, maka indeks kepuasan masyarakat/IKM mengukur *magnitude* (arah) dan deprivasi (kesenjangan).

Dengan diterbitkannya *Human Development Report* (HDR)–*Human Development Index* (HDI) oleh UNDP akan memudahkan para pembuat kebijakan untuk mengukur pembangunan manusia. Hal ini disebabkan antara lain oleh kesederhanaan metode penghitungannya, bersifat global, tidak terlalu rinci, dan merupakan kombinasi komponen sosial dan ekonomi. Dalam era otonomi daerah, prioritas pembangunan perlu benar-benar diarahkan pada kelompok penduduk, daerah dan sektor yang paling kritis untuk mendapat perhatian. Apalagi kalau dana daerah otonom tersebut sangat terbatas sehingga alokasinya perlu disusun seefisien mungkin. Oleh karena itu kehadiran HDR dan HDI menjadi lebih strategis bagi para pembuat kebijakan di kabupaten/kota.

BAB 2

FORMULA DAN METODE PERHITUNGAN

2.1 PENGUKURAN IPM

Human Development Report (Laporan Pembangunan Manusia) yang pertama pada tahun 1990 mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk membuat manusia mampu mempunyai lebih banyak pilihan. Pendapatan adalah salah satu dari pilihan yang dimiliki manusia, tetapi bukanlah suatu totalitas dari semua aspek kehidupan manusia, pilihan yang tidak kalah penting adalah pilihan kesehatan, pengetahuan, lingkungan fisik yang baik dan kebebasan untuk bertindak. Dengan adanya pilihan-pilihan tersebut diharapkan adanya kemajuan dalam pembangunan manusia tersebut.

Untuk mengetahui status dan kemajuan pembangunan manusia (UNDP; 1990) ukuran umum yang dipakai adalah Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan indeks komposit yang dapat mengukur pencapaian keseluruhan dari suatu daerah dalam tiga dimensi indikator komponen pilihan dasar yaitu :

1. Lamanya hidup adalah hidup sehat dan umur panjang yang diukur dengan angka harapan hidup waktu lahir.
2. Pengetahuan atau pendidikan yang diukur dengan rata-rata antara harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.

3. Standar kehidupan yang layak diukur dengan pengeluaran per kapita atau Paritas Daya Beli (*Purchasing Power Parity/PPP*) per kapita.

Indikator IPM yang dipilih cukup sensitif dan dapat berperan sebagai refleksi tentang fenomena perkembangan manusia. Dalam pemilihan indikator berdasarkan pada pendekatan masukan (input) dan pendekatan hasil (output). Pendekatan masukan sebagai variabel yang mempengaruhi dan pendekatan hasil sebagai variabel yang dipengaruhi. Indikator yang dipengaruhi disebut sebagai indikator inti dan indikator yang mempengaruhi disebut sebagai indikator sektoral.

Sejak awal diluncurkan di tahun 1990 hingga 2014, metodologi penghitungan IPM sudah beberapa kali mengalami perubahan. Jika di tahun 1990 komponen yang digunakan adalah Angka Harapan Hidup (AHH), Anak Masih Hidup (AMH), dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Pada tahun 2010, UNDP mengubah komponen yang digunakan yaitu: AHH, Rata-rata lama sekolah (RLS), Harapan lama sekolah (HLS), dan Produk Nasional Bruto (PNB). Perubahan metode penghitungan IPM sebagaimana disajikan pada gambar 2.



Gambar 2.1. Perubahan Metodologi IPM

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dalam penghitungan IPM tahun 2014 BPS secara nasional melaksanakan *upgrading* metodologi penghitungan Angka IPM, hal ini dilakukan dengan beberapa alasan, antar lain :

- Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi (mendekati 100%), sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik.
- PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

- Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

Perubahan yang terjadi adalah pada indikator yang mendasari perhitungan IPM dan metode agregasi penghitungan yang digunakan. Indikator Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah, dan PDRB perkapita diganti dengan PNB perkapita. Sedangkan metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik. Dengan perubahan ini diharapkan dapat menjadi indeks yang diskriminatif (dapat membedakan kondisi antar daerah dengan baik). Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. Sementara PNB menggantikan PDB/PDRB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

Kemudian perubahan dalam metode agregasi lebih memungkinkan untuk mencapai pembangunan manusia yang baik tidak bisa hanya mengandalkan salah satu dimensi dasar saja tetapi ketiga dimensi dasar tersebut harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut.

Dimensi Kesehatan:

$$I_{\text{kesehatan}} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\text{maks}} - AHH_{\min}}$$

Dimensi Pendidikan:

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\text{maks}} - HLS_{\min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\text{maks}} - RLS_{\min}}$$

$$I_{\text{pendidikan}} = \frac{I_{HLS} - I_{RLS}}{2}$$

Dimensi Pengeluaran:

$$I_{\text{pengadaan}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\text{maks}}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$$

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan dan pengeluaran dengan rumus sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}} \times 100}$$

Dengan metode penghitungan yang baru maka data-data yang dapat diimplementasikan dalam metode penghitungan baru tersebut adalah sebagai berikut:

- Angka harapan hidup saat lahir (Sensus Penduduk 2010 (SP2010)), Proyeksi Penduduk.
- Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di peroleh dari sumber data hasil (Survei Sosial Ekonomi Nasional/ SUSENAS)
- PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan data SUSENAS merujuk pada 96 komoditas dari sebelumnya hanya 27 komoditi.
- Penentuan nilai maksimum dan minimum menggunakan Standar UNDP untuk keterbandingan global, kecuali pengeluaran per kapita sebagai refleksi hidup layak karena menggunakan ukuran rupiah.

Dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia, UNDP menetapkan Nilai Maksimum dan Minimum untuk masing-masing indikator yang juga menjadi acuan BPS dalam menghitung IPM hingga ke tingkat Kabupaten dan Kota. Standar nilai untuk menghitung IPM disajikan dalam table 2.1.

Tabel 2.1. Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Indikator IPM

Komponen IPM	Nilai* Maksimum	Nilai* Minimum	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Harapan Hidup	85	20	Standar UNDP
Harapan Lama Sekolah	18	0	Standar UNDP
Rata-rata Lama Sekolah (thn)	15	0	UNDP menggunakan <i>combined gross enrolment ratio</i>
Paritas Daya Beli	26.572.352 ^{a)} (Rp.)	1.007.436 ^{a)} (Rp.)	UNDP menggunakan PDB riil per kapita yang telah disesuaikan

^{a)} *daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten (Jaksel) yang diproyeksikan hingga 2025*

^{b)} *daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (Tolikara)*

^{*} *Nilai maksimum dan minimum sesuai dengan ketentuan UNDP (1994:108) kecuali untuk Purchasing Power Parity (PPP)*

Penetapan nilai tersebut memberikan keuntungan antara lain bahwa angka IPM yang dihasilkan :

- Dapat dibandingkan antar waktu (karena angka ideal tidak akan tercapai oleh IPM suatu daerah dalam waktu dekat).
- Dapat diletakkan dalam skala nasional bahkan internasional karena 3 dari 4 komponen yang digunakan berlaku secara internasional.

Tingkatan status pembangunan manusia suatu wilayah oleh UNDP dibagi ke dalam tiga golongan yaitu rendah (kurang dari 50), sedang atau menengah (antara 50-80), dan tinggi (80 ke atas). Sedangkan untuk keperluan perbandingan antar kabupaten/kota tingkatan status menengah dipecah lagi menjadi dua, yaitu menengah bawah dan menengah atas. Dengan demikian kriteria tingkatan status pembangunan manusia sebagai berikut :

Tabel 2.2. Kriteria Status Pembangunan Manusia

Tingkatan Status	Kriteria
(1)	(2)
Rendah	$IPM < 60$
Sedang	$60 \leq IPM < 70$
Tinggi	$70 \leq IPM < 80$
Sangat Tinggi	$IPM \geq 80$

Sumber: Badan Pusat Statistik (2009)

2.1.1. Angka Harapan Hidup (e0)

Indikator angka harapan hidup merupakan salah satu dimensi dasar pembangunan manusia khususnya di bidang kesehatan yang diharapkan dapat mencerminkan “lama hidup” sekaligus “hidup sehat” dalam masyarakat. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Penghitungan angka harapan hidup melalui pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Angka harapan hidup yang digunakan untuk menghitung IPM Tahun 2017 bersumber dari data Sensus Penduduk 2010 dan proyeksi penduduk.

Untuk mengukur lama hidup, BPS menggunakan ukuran atau indikator angka harapan hidup waktu lahir atau *life expectancy at birth* (e0) yaitu rata-rata perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Tampaknya

tidak ada yang meragukan e0 sebagai ukuran usia hidup. Namun yang perlu dicatat adalah bahwa disperspektif konsep pembangunan manusia yang ingin diukur sebenarnya tidak hanya dari segi usia panjang sebagaimana terefleksikan dalam e0, tetapi juga segi “sehat”. Tetapi yang terakhir ini sulit dioperasionalkan.

Meningkatnya angka harapan hidup dapat diartikan adanya keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan yang biasanya ditandai dengan membaiknya kondisi sosial ekonomi penduduk, membaiknya kesehatan masyarakat dan lingkungan. Selain itu, karena UNDP juga menggunakan e0 sebagai IPM global maka angkanya dapat dibandingkan secara internasional.

2.1.2. Rata-rata Lama Sekolah (MYS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (EYS)

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas (BPS). Konversi yang digunakan untuk menghitung rata-rata lama sekolah sebagaimana disajikan dalam table 2.3.

Tabel 2.3. Konversi Tahun menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah (MYS)

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Lama Sekolah (tahun)
(1)	(2)
1. Tidak/belum pernah sekolah	0
2. Sekolah Dasar (SD)	6
3. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	9
4. Sekolah Menengah (SMU & yang sederajat)	12
5. Diploma I (DI)	13
6. Diploma II (DII)	14
7. Akademi/Diploma III (DIII)	15
8. Diploma IV/Sarjana	16
9. S2	18
10. S3	21

Sumber: BPS Kota Bontang

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

2.1.3. Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (PPP)

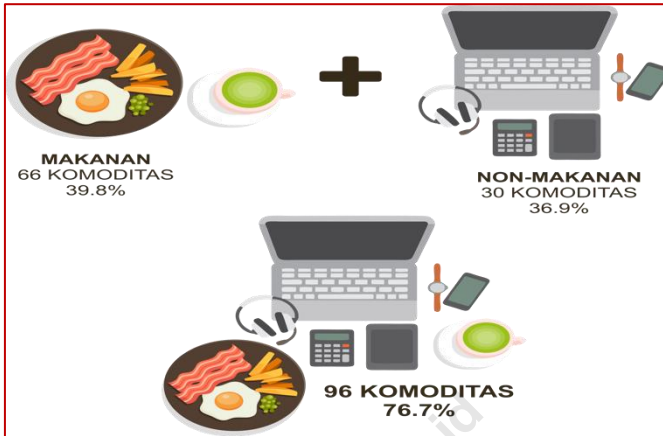
Pengeluaran perkapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran perkapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*). Rata-rata pengeluaran perkapita setahun diperoleh dari hasil pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan dihitung dari level provinsi hingga kabupaten dan kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat constant/riil dengan tahun dasar 2012 = 100.



Gambar 2.2. Tahapan Penghitungan Pengeluaran Riil Disesuaikan

Sumber: Badan Pusat Statistik RI

Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao. Gambar 2.3. menunjukkan bahwa 39,8% pengeluaran untuk bahan makanan dan 36,9 persen untuk non makanan.



Gambar 2.3. Penghitungan Paritas Daya Beli (dihitung dari bundle komoditas makanan dan non makanan)

Sumber: Badan Pusat Statistik RI

Rumus penghitungan paritas daya beli (PPP) adalah sebagai berikut:

$$PPP_j = \sqrt[m]{\prod_{i=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)}$$

p_{ij} = harga komoditas i di kab/kota j

p_{ik} = harga komoditas i di Jakarta Selatan

m = jumlah komoditas

2.1.4. Pertumbuhan IPM

Dalam merumuskan kebijakan pembangunan, perlu diperhatikan tingkat kemajuan pembangunan manusia. Aspek yang digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan manusia tersebut selain membandingkan antar wilayah atau posisi suatu wilayah relatif terhadap wilayah yang lain berdasarkan besaran IPM adalah mengkaji dari pencapaian setelah berbagai program diimplementasikan dalam suatu periode tertentu.

Perbedaan laju perubahan IPM selama periode waktu tertentu dapat diukur dengan menggunakan rata-rata reduksi *shortfall* per tahun (*Annual Reduction in Shortfall*). Nilai “*shortfall*” secara sederhana mengukur keberhasilan dipandang dari segi jarak antara apa yang telah dicapai dengan apa yang harus dicapai, yaitu jarak dengan nilai maksimum. Kondisi ideal yang dapat dicapai adalah nilai IPM sama dengan 100. Nilai reduksi *shortfall* yang lebih besar menandakan peningkatan IPM yang lebih cepat. Pengukuran ini didasarkan pada asumsi bahwa laju perubahan tidak bersifat linier, tetapi laju perubahan cenderung melambat pada tingkat yang lebih tinggi.

Cara penghitungan “*Shortfall*” dinyatakan dengan rumus:

$$\left[\frac{IPM_{(t+n)} - IPM_{(t)}}{IPM_{(ref)} - IPM_{(t)}} \times 100 \right]^{1/n}$$

Dimana :

$IPM_{(t)}$: IPM pada tahun ke -t

$IPM_{(t+n)}$: IPM tahun ke t+n

IPM_{ref} : IPM acuan (biasanya IPM ideal)

2.2 DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR TERPILIH

Untuk dapat melihat dengan jelas dan terarah beragam persoalan pembangunan manusia selama ini serta bagaimana mengimplementasikan program-program pembangunan secara benar dan terukur diperlukan adanya suatu ukuran indikator yang *reliable* dan handal. Berikut beberapa definisi operasional yang sering digunakan dalam hal pembangunan manusia:

- **Rasio jenis kelamin:** Perbandingan antara penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan, dikalikan 100.
- **Angka ketergantungan:** Perbandingan antara jumlah penduduk usia < 15 tahun ditambah usia > 65 tahun terhadap penduduk usia 15 - 64 tahun, dikalikan 100.
- **Rata-rata Lama Sekolah:** penduduk usia 25 tahun ke atas.
- **Harapan Lama Sekolah:** harapan penduduk usia 7 tahun ke atas untuk dapat bersekolah.
- **Angka Partisipasi Murni SD:** Proporsi penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di SD.
- **Angka Partisipasi Murni SLTP:** Proporsi penduduk usia 13 - 15 tahun yang sedang bersekolah di SLTP.
- **Angka Partisipasi Murni SLTA:** Proporsi penduduk usia 16 - 18 tahun yang sedang bersekolah di SLTA.
- **Jumlah penduduk usia sekolah:** Banyaknya penduduk yang berusia antara 7 sampai 24 tahun.

- **Bekerja:** Melakukan kegiatan/pekerjaan paling sedikit 1 (satu) jam berturut-turut selama seminggu dengan maksud untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pekerja keluarga yang tidak dibayar termasuk kelompok penduduk yang bekerja.
- **Angkatan Kerja:** Penduduk usia 10 tahun ke atas yang bekerja atau mencari pekerjaan.
- **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja:** Perbandingan angkatan kerja terhadap penduduk usia 10 tahun.
- **Angka Pengangguran Terbuka:** Perbandingan penduduk yang mencari kerja terhadap angkatan kerja.
- **Persentase pekerja dengan status berusaha sendiri:** Proporsi penduduk usia 10 tahun keatas dengan status berusaha sendiri.
- **Persentase pekerja dengan status berusaha sendiri dibantu pekerja tidak tetap:** Proporsi penduduk usia 10 tahun ke atas dengan status berusaha sendiri dibantu pekerja tak dibayar.
- **Persentase pekerja dengan status berusaha dengan buruh tetap:** Proporsi penduduk usia 10 tahun keatas yang berusaha dengan buruh tetap.
- **Persentase pekerja dengan status berusaha pekerja tak dibayar:** Proporsi penduduk usia 10 tahun ke atas dengan status pekerja keluarga.
- **Persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga medis:** Proporsi balita yang kelahirannya ditolong oleh tenaga medis (dokter, bidan, dan tenaga medis lainnya).

- **Angka Harapan Hidup waktu lahir:** Perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh sekelompok penduduk.
- **Angka Kematian Bayi:** Besarnya kemungkinan bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun, dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup.
- **Persentase rumah tangga beratap layak:** Proporsi rumah tangga yang menempati rumah dengan atap layak (atap selain dari dedaunan).
- **Persentase rumah tangga berpenerangan Listrik:** Proporsi rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik.
- **Persentase rumah tangga bersumber air minum leding:** Proporsi rumah tangga dengan sumber air minum leding.
- **Persentase rumah tangga bersumber air minum bersih:** Proporsi rumah tangga dengan sumber air minum pompa / sumur / mata air yang jaraknya lebih besar dari 10 meter dengan tempat penampungan limbah kotoran terdekat.
- **Persentase rumah tangga berjamban dengan tangki septik:** Proporsi rumah tangga yang mempunyai jamban dengan tangki septik.
- **Penduduk Miskin:** Penduduk yang secara ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan setara 2100 kalori dan kebutuhan non makanan yang mendasar.
- **Garis Kemiskinan:** Suatu batas dimana penduduk dengan pengeluaran kurang dari batas tersebut dikategorikan sebagai miskin. Garis kemiskinan terdiri dari dua komponen yaitu

komponen batas kecukupan pangan (GKM) dan komponen batas kecukupan non makanan (GKNM).

<https://bontangkota.bps.go.id>



BAB 3

GAMBARAN UMUM KOTA BONTANG

3.1 JUMLAH DAN PERTUMBUHAN PENDUDUK

Jumlah penduduk Kota Bontang kondisi pertengahan tahun 2017 sekitar 170.611 jiwa. Dari jumlah tersebut tercatat bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dibanding dengan perempuan, dengan mempunyai rasio jenis kelamin tercatat 109,77 yang berarti diantara 100 perempuan terdapat 110 laki-laki.

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Bontang dari tahun 2000 (SP-2000 tercatat 99.617 jiwa) sampai tahun 2010 (SP-2010 143.683 jiwa) adalah 44,24 persen periode 2000-2010, atau rata-rata pertumbuhan 3,76 persen pertahun. Sedangkan LPP selama periode 2010-2017 sekitar 18,74 persen atau rata-rata pertumbuhan per tahun sekitar 2,45 persen pertahun. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dalam dua periode di atas, penambahan penduduk di kota ini dapat dikendalikan.

Kalau dilihat dari komposisi umur penduduk dapat diperoleh Angka Beban Tanggungan (ABT) yang secara kasar dapat mencerminkan indikator ekonomi. Makin rendah ABT diperkirakan indikator ekonomi penduduk suatu daerah makin baik, karena dapat dikatakan bahwa jumlah tanggungan penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) yaitu penduduk usia muda (0-14 tahun) dan usia lanjut (65 tahun ke atas) juga semakin mengecil. ABT di Kota Bontang sekitar 50,70 (2000), menjadi 48,41

(2010) dan 44,84 tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa setiap seratus penduduk usia produktif secara hipotesis/teori menanggung sekitar 45 penduduk usia non produktif (usia muda dan lanjut).

3.2 KEADAAN KESEHATAN

Usia Harapan Hidup (e0) atau lamanya hidup terhitung sejak lahir, yang ternyata telah mengalami peningkatan dari 72,89 tahun (tahun 2010) menjadi 73,70 tahun (tahun 2017). Besar kecilnya UHH dipengaruhi oleh banyak variabel baik yang bersifat endogen (kondisi bawaan) maupun eksogen (pengaruh dari luar). Khusus untuk variabel eksogen dapat dibuat daftar yang cukup panjang diantaranya mencakup input makanan, upaya kesehatan dan kondisi lingkungan yang juga dipengaruhi oleh variabel lainnya.

Pengaruh variabel-variabel tersebut dapat bersifat langsung maupun tidak langsung, dapat seketika maupun dengan tenggang waktu (*time lag*) tertentu. Pengaruh variabel-variabel tersebut bekerja secara tersendiri maupun bersinergi dengan variabel lain. Sementara itu, terdapat beberapa variabel yang diperkirakan berpengaruh terhadap UHH/e0. Secara umum diharapkan bahwa dengan semakin tingginya persentase balita yang ditolong kelahirannya oleh tenaga medis akan semakin tinggi kemungkinan kelangsungan hidupnya. Tetapi perkiraan hubungan tersebut dapat menyimpang jika pertolongan tenaga medis digunakan untuk proses kelahiran yang abnormal dan dengan penanganan yang sudah terlambat.

Demikian pula jika dihubungkan dengan beberapa variabel lain seperti persentase bayi yang disusui secara eksklusif selama 4-6 bulan, persentase balita yang telah diimunisasi secara lengkap, serta tingkat ketersediaan puskesmas dan dokter. Terlepas dari keterkaitan tersebut gambaran data menunjukkan perlu adanya intervensi, terutama dari pemerintah untuk memperbaiki derajat kesehatan masyarakat seperti perluasan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga medis.

3.3 TINGKAT PENDIDIKAN

Tingkat Pendidikan penduduk Kota Bontang berdasarkan hasil Susenas 2017 ternyata cukup bervariasi. Hal ini tercermin dari indikator yang mencakup rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah sekolah dan persentase penduduk yang telah menamatkan SMP ke atas.

Rata-rata Lama Sekolah (MYS), terlihat diatas 7 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kota Bontang rata-rata hanya menamatkan sekolah sampai pada tingkat SD, ini tercermin masih rendahnya penduduk yang tamat SMP ke atas. Sementara itu Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada usia SMP (13-15 tahun) dan SMA (16-18 tahun) serta perguruan tinggi (19-24 tahun) juga masih tergolong rendah. Kondisi seperti ini mungkin disebabkan oleh faktor fasilitas pendidikan yang masih kurang memadai dan sukar dijangkau, disamping itu masih rendahnya kesadaran para orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.

3.4 KEADAAN KETENAGAKERJAAN

Bekerja adalah kegiatan untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan bagi kelangsungan hidup seseorang atau sekelompok orang tertentu. Bekerja atau tidaknya seseorang dipengaruhi oleh adanya kebutuhan ekonomi dan kebutuhan non ekonomi. Adanya tekanan kebutuhan ekonomi akan memaksa paling tidak satu orang dari suatu rumahtangga untuk bekerja. Makin besar tekanan tersebut makin banyak anggota rumahtangga yang terjun ke pasar tenaga kerja baik bekerja maupun mencari pekerjaan. Mereka yang bekerja dan mereka yang sedang mencari pekerjaan disebut dengan angkatan kerja (AK). Dalam kondisi krisis ekonomi sesungguhnya akan semakin banyak penduduk yang tergolong sebagai angkatan kerja, tetapi kondisi krisis pula yang mengakibatkan terbatasnya peluang/kesempatan kerja. Salah satu akibatnya dapat berupa peningkatan tingkat pengangguran terbuka (TPT), tetapi data tahun 2010 dibandingkan data tahun 2017 menunjukkan peningkatan TPT (dari 12,77 persen menjadi 12,44 persen).

Dampak krisis ekonomi lebih terasa pada sektor industri, pertambangan yang banyak mengandalkan komponen import dan tergantung sumber daya alam. Mereka yang kehilangan pekerjaan kemudian sebagian beralih ke sektor pertanian dan jasa (termasuk perdagangan) yang bersifat fleksibel dalam penyerapan tenaga kerja. Hal ini tercermin dari penyerapan tenaga kerja sektor industri relatif kecil dibanding dengan sektor pertanian dan jasa-jasa.

Gambaran dampak krisis terhadap keadaan ketenagakerjaan tingkat propinsi sekilas tidak terlalu mengkhawatirkan, tetapi keadaan

ketenagakerjaan di beberapa kabupaten/kota ternyata mengalami kemerosotan. Dampak yang paling mengkhawatirkan adalah dalam bentuk kombinasi rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) disertai dengan tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT). Hal tersebut terutama berkaitan dengan sangat minimnya kesempatan kerja yang berakibat pada tingginya TPT dan bahkan sebagian keluar dari angkatan kerja.

3.5 FASILITAS PERUMAHAN

Keadaan perumahan (kualitas dan fasilitas) menggambarkan tingkat kesejahteraan dan budaya, serta kondisi sosial-ekonomi penduduk yang dapat saling berinteraksi dan pada gilirannya dapat mempengaruhi kondisi kesehatan penduduk. Rumah tradisional penduduk Kota Bontang adalah rumah panggung yang berlantai dan berdinding kayu, serta beratap dedaunan.

Seiring dengan perkembangan teknologi serta ekspose terhadap pola hidup masyarakat dan program perbaikan rumah telah berangsur-angsur terjadi perubahan. Perubahan yang utama adalah jenis atap yang beralih dari dedaunan menjadi seng, serta perubahan pemanfaatan kolong rumah panggung menjadi tempat hunian sehingga lantai dan dinding berubah menjadi tembok/semen dan kolam produktif budidaya ikan. Perkembangan berikutnya adalah pergeseran pembangunan rumah baru dari rumah panggung menjadi bukan panggung. Pergeseran tersebut

diantaranya mengakibatkan adanya rumah yang masih berlantai tanah, yang tentunya berdampak kurang baik bagi kesehatan penghuninya.

3.6 PEREKONOMIAN

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB atas dasar harga konstan yang diperoleh pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai PDRB sebelumnya. Penggunaan angka atas dasar harga konstan dimaksudkan untuk menghindari pengaruh perubahan harga yang disebut inflasi, sehingga perubahan yang diukur adalah perubahan produksi yang menggambarkan pertumbuhan riil ekonomi, sedangkan harga konstan yang dimaksud adalah harga konstan tahun 2010.

Bila diperhatikan selama periode 2011-2017, terlihat bahwa perekonomian Kota Bontang sangat berfluktuatif, hal ini terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi melambat pada kisaran rata-rata -2,51 persen per tahun. Pertumbuhan ekonomi di wilayah ini dalam periode tersebut tercatat cukup tinggi terjadi pada tahun 2015 mencapai 4,36% dari tahun sebelumnya dan naik tipis 0,68 persen dalam tahun 2017. Mengingat dalam periode tersebut telah terjadi pelambatan yang disebabkan menurunnya produksi *Liqetied Natural Gas*/Gas Alam Cair yang mempunyai kontribusi sekitar 55,37 persen terhadap pembentukan PDRB Kota Bontang.

Struktur ekonomi Kota Bontang dapat dilihat dari peranan masing-masing kategori dalam sumbangannya terhadap PDRB total atas dasar harga berlaku (ADHB). Di Kota Bontang tahun 2017, peranan sektor industri pengolahan terhadap perekonomian masih cukup besar yakni

sebesar 83,95 persen, menurun dibanding tahun 2015 yang mencapai 84,43 persen, dan 88,69 persen tahun 2010. Peranan sektor pertanian dalam arti luas (perikanan, peternakan, perkebunan, tanaman pangan dan kehutanan) relatif rendah tercatat 0,96 persen pada tahun 2017, naik dibanding kontribusi tahun 2015 0,88 persen dan 0,35 persen tahun 2017.

Sektor paling rendah terhadap kontribusi ekonomi di wilayah ini adalah pengadaan air, pengelolaan sampah, dan limbah cair, disusul pengadaan listrik dan Gas masing-masing 0,02% dan 0,03% tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kota Bontang perekonomiannya masih tertumpu pada sektor Industri pengolahan memantapkan sebagai Kota Industri dan Kondesat.

Tabel dibawah ini menyajikan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Kota Bontang selama Tahun 2011-2017

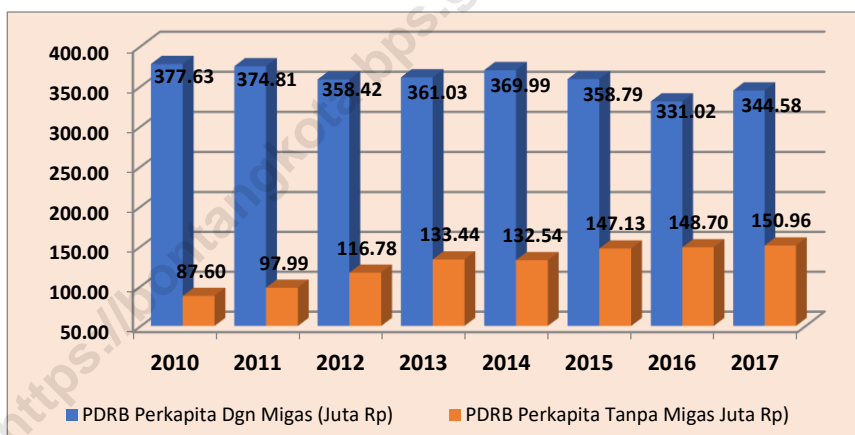
Tabel 3.1. Perkembangan dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang, 2011-2017

TAHUN	PDRB ADH Berliku (Juta Rp)	Perkembangan (Persen)	PDRB ADH Konstan (Juta Rp)	Pertumbuhan (Persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2011	55 625 376,5	2,52	50 234 499,3	(7,42)
2012	54 511 513,8	(2,00)	45 623 745,5	(9,18)
2013	56 278 078,7	3,24	43 012 336,3	(5,72)
2014	59 055 313,4	4,93	41 622 133,4	(3,23)
2015	58 600 855,0	(0,77)	43 437 183,6	4,36
2016	55 233 873,6	(5,75)	42 836 359,1	(1,38)
2017	58 787 621,1	6,43	43 128 297,4	0,68
Rata-rata		0,93		(2,51)

Sumber : BPS Kota Bontang

Secara absolut perkembangan ekonomi Kota Bontang yang tetap ada pertumbuhan, namun setiap tahunnya tidak sebesar tumbuhnya tahun sebelumnya. Maksudnya tetap ada produksi diwilayah Kota Bontang secara riil (harga konstan Tahun 2010) terjadi pada tahun 2010 sebesar 54,26 Trilyun rupiah. Penyajian pada tabel 3.1. diatas cukup besar mencapai 4,36 persen tahun 2015, dan tumbuh 0,68 persen pada tahun 2017 dari tahun 2016. Sebaliknya pertumbuhan yang terendah terjadi pada tahun 2012 sebesar negative 9,18 persen, disusul tahun 2011 negatif 7,42 persen dari tahun 2010.

Penghitungan PDRB perkapita dihitung dengan membagi PDRB atas harga berlaku dengan penduduk pertengahan tahun. Hasil pengolahan menunjukkan bahwa PDRB perkapita Kota Bontang pada tahun 2017 sebesar 344,58 Juta rupiah dengan Migas dan 150,96 juta rupiah tanpa Migas. PDRB perkapita dengan Migas tertinggi terjadi pada tahun 2010 mencapai 377,63 juta rupiah, menurun tipis tahun 2011 menjadi 374,81 juta rupiah. Angka tersebut bukan merupakan penerimaan secara riil melainkan gambaran rata-rata tingkat pendapatan penduduk.



Gambar 3.1. Angka PDRB Per Kapita/Tahun Kota Bontang (Juta Rp)

Sumber : BPS Kota Bontang

BAB 4

PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PERBANDINGAN ANTAR DAERAH

Pembangunan yang hanya menitikberatkan pada sektor ekonomi dengan bertumpu pada peningkatan hasil produksi/laju pertumbuhan ekonomi, telah terbukti tidak selalu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini karena tidak dapat mengungkap fakta vital tentang keadaan penduduk terutama yang berkaitan dengan peluang untuk hidup panjang, keterlibatan dan partisipasi dalam dunia ilmu pengetahuan, menikmati hidup secara layak bagi kemanusiaan. Sehingga terjadi pergeseran paradigma pembangunan dengan berorientasi pada pembangunan manusia. Namun demikian, pembangunan manusia tidak mungkin dapat berkesinambungan tanpa dukungan dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena pembangunan manusia merupakan tujuan akhir, sedangkan pertumbuhan ekonomi merupakan alat.

Dalam era reformasi sekarang ini, otonomi daerah telah diterapkan secara menyeluruh sejak tahun 2004, sehingga roda pembangunan terfokus pelaksanaannya pada wilayah kabupaten/kota. Untuk itu, tingkat keberhasilan pembangunan (kinerja) perlu diukur pada masing-masing kabupaten/kota. Dalam pembahasan ini, kinerja pembangunan yang dimaksud adalah kinerja pembangunan manusia yang disajikan dalam satu indikator komposit (angka tunggal) yaitu Indeks Pemabangunan Manusia (IPM).

Sebelum pembahasan mengenai perbandingan IPM antar kabupaten/kota, perlu diuraikan terlebih dahulu mengenai keadaan dari masing-masing indikator (komponen) IPM. Komponen-komponen tersebut adalah indikator umur harapan hidup (UHH), harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah (RLS) dan Konsumsi perkapita atau paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*).

4.1 PENCAPAIAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Pencapaian pembangunan manusia yang diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Oleh karenanya peningkatan pencapaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, yang didukung oleh kenaikan komponen. Kenaikan IPM dan komponennya di Kota Bontang, sebagaimana disajikan dalam tabel 4.1. Dalam tahun 2017 tercatat umur harapan hidup mencapai 73,72 tahun sejak lahir, harapan lama sekolah menjadi 12,88 tahun dan rata-rata lama sekolah menjadi 10,70 tahun dan kemampuan konsumsi perkapita atau disebut rata-rata biaya hidup sebesar 16,27 juta rupiah.

Tabel 4.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bontang Menurut Komponen, 2010-2017

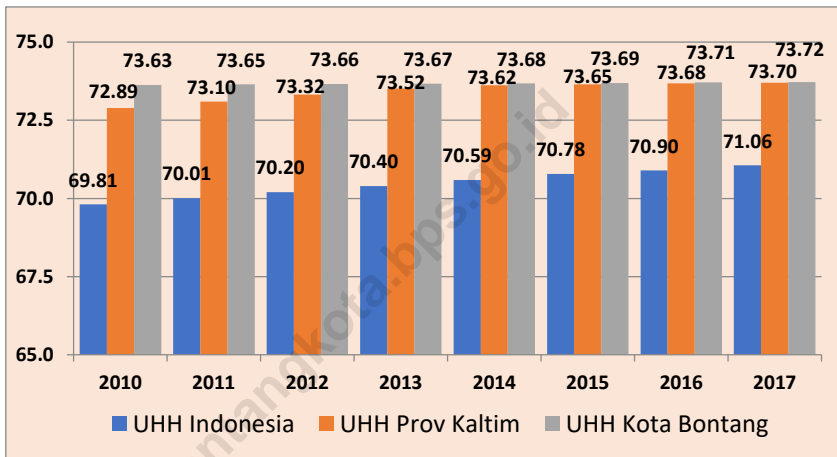
PDRB Per Kapita	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Angka Harapan Hidup (Tahun)	73,65	73,66	73,67	73,68	73,69	73,71	73,72
Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	11,94	12,12	12,50	12,68	12,77	12,79	12,88
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	10,22	10,28	10,34	10,35	10,38	10,39	10,70
Pengeluaran Riil Perkapita (Juta Rupiah)	15.271	15.318	15.820	15.878	15.980	16.157	16.271
IPM Kota Bontang (%)	77,25	77,55	78,34	78,58	78,78	78,92	79,47
Pertumbuhan (%)	0,36	0,39	1,02	0,31	0,25	0,18	0,70
IPM Kaltim	72,02	72,62	73,21	73,94	74,17	74,59	75,12
IPM Indonesia	67,09	67,0	68,31	69,10	69,55	70,18	70,81

Sumber : BPS RI

Indeks Pembangunan Manusia Kota Bontang di tahun 2017 sebagaimana terlihat pada tabel 4.1 tercatat 79,47 atau naik 0,55 tahun dari tahun 2016 (naik 0,70 persen). Pencapaian IPM Kota Bontang saat ini jauh diatas capaian Provinsi Kalimantan Timur 75,12 dan Indonesia 70,81 pada tahun yang sama.

4.1.1 Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Kota Bontang pada tahun 2017 menunjukkan capaian yang signifikan menjadi 73,72 tahun. Usia harapan hidup saat lahir artinya usia lama rata-rata hidup yang lahir pada tahun 2017 mempunyai umur 73-74 tahun tampak series pada grafik berikut.



Gambar 4.1. Usia Harapan Hidup Sejak Lahir (UHH) Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia, 2010-2017

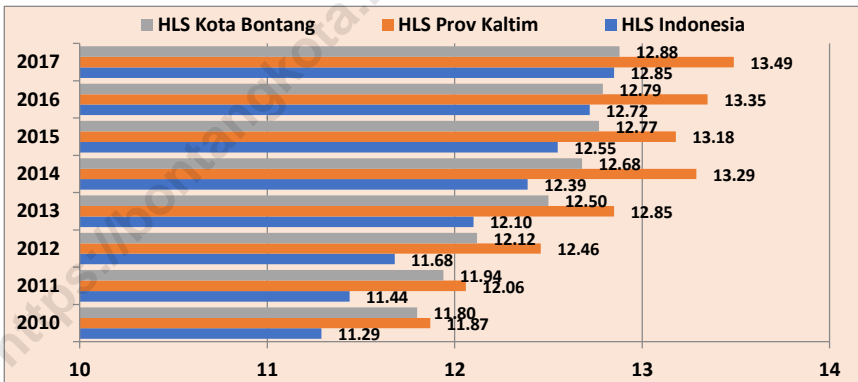
Sumber : BPS RI

Kecepatan pertumbuhan umur harapan hidup Kota Bontang dalam tujuh tahun terakhir tercatat 0,09 tahun, artinya semakin tinggi umur harapan hidup suatu daerah semakin berat untuk mencapai angka ideal 100 tahun. Capaian Kota Bontang bila dibandingkan dengan angka yang pertumbuhan Balikpapan tercatat 0,07 tahun. Pertumbuhan Kalimantan Timur tercatat 0,81 tahun dan Indonesia 1,25 tahun dalam periode yang sama. Adapun capaian usia harapan hidup tahun 2017 Kota Bontang

sebesar 73,72 tahun diatas angka capaian Provinsi Kalimantan Timur 73,70 tahun dan Indonesia 71,06 tahun.

4.1.2 Dimensi Pengetahuan

Dimensi pendidikan terdiri dari 2 unsur yaitu angka harapan lama sekolah penduduk usia 7 tahun keatas dan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun keatas. Kemajuan harapan lama sekolah tahun 2017 Kota Bontang tercatat 12,88 tahun, masih dibawah angka capaian Provinsi Kaltim 13,49 tahun dan diatas capaian angka Indonesia 12,85 tahun sebagaimana terlihat pada Gambar 4.2.

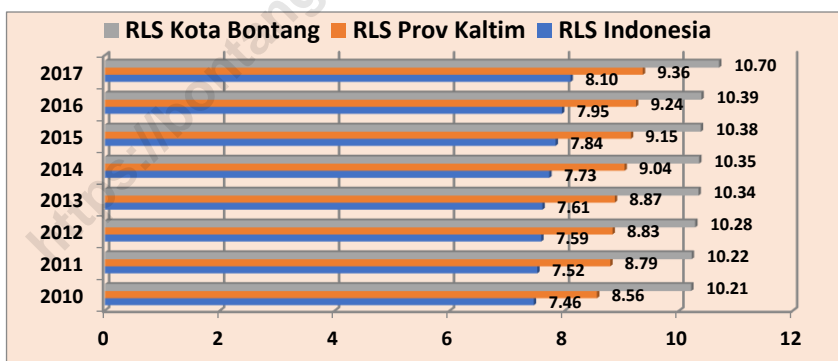


Gambar 4.2. Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia, 2010-2017 (Tahun)

Sumber : BPS RI

Hal ini mengharapakan perhatian khusus semua pihak berupaya menumbuhkan dan meningkatkan minat masyarakat untuk berinvestasi dibidang pendidikan, dan perusahaan yang berorientasi kepada tingkat pendidikan sumber daya manusianya. Demikian juga angka pertumbuhan selama tujuh tahun terakhir Kota Bontang baru mampu 9,15 persen, sedang Kalimantan Timur tumbuh dua digit yaitu 13,65 persen dan Indonesia lebih tinggi 13,82 persen. Dilihat dari kemajuan pertumbuhan harapan lama sekolah selama tujuh tahun terakhir Kota Bontang mencatat 1,08 tahun, dibawah angka Kaltim 1,62 tahun dan Indonesia 1,56 tahun.

Sementara itu untuk rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun Kota Bontang keatas mencatat 10,70 tahun artinya rata-rata telah berpendidikan setingkat SMA kelas 1 dan kelas 2 pada tahun 2017 (Gambar 4.3).



Gambar 4.3. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia, 2010-2017 (Tahun)

Sumber : BPS RI

Capaian ini lebih tinggi dibanding dengan capaian Kalimantan Timur mencatat 9,36 tahun dan Indonesia 8,10 tahun berikut ini data

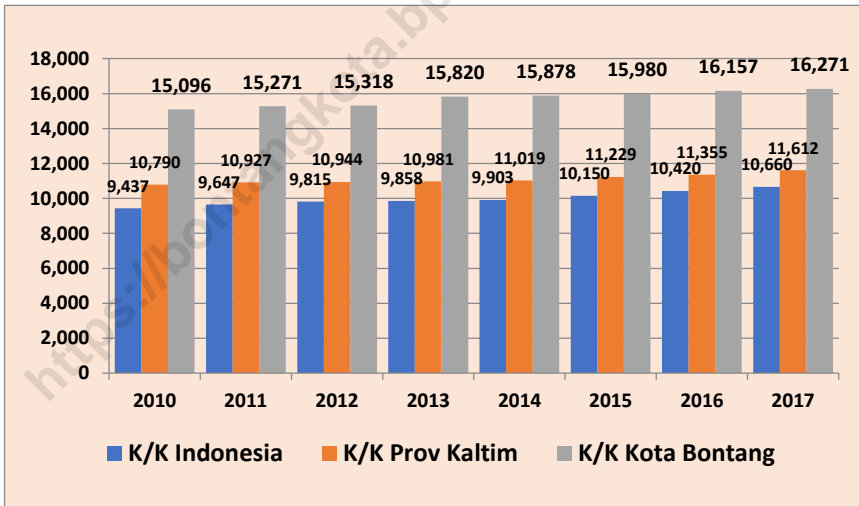
series rata-rata lama sekolah. Namun secara keseluruhan perlu perhatian khusus semua pihak berupaya menumbuhkan dan meningkatkan minat masyarakat untuk berinvestasi dibidang pendidikan, dan perusahaan yang berorientasi kepada tingkat pendidikan sumber daya manusianya.

4.1.3 Dimensi Standar Hidup Layak

Komponen *Purchasing Power Parity* (PPP) atau dikenal dengan komponen konsumsi atau standar hidup layak bagi masyarakat di Indonesia. Besarnya nilai standat hidup layak di Kota Bontang tahun 2017 tercatat mencapai 16,27 juta rupiah perkapita pertahun dengan pertumbuhan kesejahteraan untuk mencapai sekitar Rp.1.172.000,- dari tahun 2010 atau tumbuh 1,08%. Yang dimaksud kinerja dibidang ekonomi atau standar hidup layak masyarakat Kota Bontang merupakan capaian tertinggi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan bahkan tertinggi dari seluruh provinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta di tahun yang sama.

4.2 PERBANDINGAN PEMBANGUNAN MANUSIA ANTAR KABUPATEN/KOTA DI KALIMANTAN TIMUR

Tingginya capaian nilai Kota Bontang ini semakin memantapkan posisi capaian IPM di Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan angka konsumsi perkapita pertahun Provinsi Kalimantan Timur tercatat 11,61 juta rupiah (rata-rata pertumbuhan 1,05% per tahun dan Indonesia 10,66 juta rupiah atau tumbuh rata-rata 1,76% pertahun periode 2010-2017. Gambar 4.4 menyajikan perkembangan tingkat konsumsi perkapita Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Indonesia periode 2010-2017.



Gambar 4.4. Konsumsi Per Kapita Per Tahun Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia (Ribuan Rupiah), 2010-2017

Sumber: BPS RI

Perbandingan antar indikator (komponen IPM seperti yang diuraikan pada subbab sebelumnya merupakan tinjauan parsial, artinya tingkat keberhasilan (kinerja) pembangunan diukur dari satu komponen. Misalnya pada bidang kesehatan tahun 2017 di Kota Bontang masih terbaik setelah Balikpapan selama tujuh tahun terakhir di Kalimantan Timur sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.2. Dibidang pendidikan (harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah) Kota Bontang dilihat dari capaian indeks pendidikan tercatat 0,7144, masih lebih baik dari capain Kalimantan Timur 0,6867 dan Indonesia 0,6269 namun belum sebaik capaian Balikpapan 0,7336 dan Samarinda 0,7510.

Tabel 4.2. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur, 2016-2017

Wilayah	2016	2017	Shortfall	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Paser	71,00	71,16	0,55	7
2. Kutai Barat	69,99	70,18	0,63	9
3. Kutai Kartanegara	72,19	72,75	2,01	5
4. Kutai Timur	71,10	71,91	2,80	6
5. Berau	73,05	73,56	1,89	4
6. Penajam Paser Utara	69,96	70,59	2,10	8
7. Mahakam Ulu	65,51	66,09	1,68	10
8. Balikpapan	78,57	79,01	2,05	3
9. Samarinda	78,91	79,46	2,61	2
10. Bontang	78,92	79,47	2,61	1
KALIMANTAN TIMUR	74,59	75,12	2,09	3
INDONESIA	70,18	70,81	2,11	-

Sumber: BPS RI

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bontang tahun 2017 sebesar 79,47 mengalami kenaikan sebesar 0,70 persen dari tahun 2016 dan masih bertahan posisi tertinggi se Kalimantan Timur. Angka IPM Kota Bontang merupakan angka tertinggi setelah Kota Samarinda (79,46) dan Kota Balikpapan (79,01) dan terendah Kabupaten Mahakam Ulu (66,09), disusul Kubar (70,18) dan PPU (70,59). Dibandingkan dengan angka yang dicapai Provinsi Kalimantan Timur sebesar 75,12 dan pencapaian Indonesia 70,81 masih dalam tahun 2017.

BAB 5

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan alat dari pembangunan (BPS). Pembangunan manusia adalah sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar manusia memiliki lebih banyak pilihan, khususnya dalam pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan dan kehidupan yang layak.

Prinsip pembangunan manusia adalah azas pemerataan yang diimplementasikan dalam berbagai program pembangunan. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan terjadi peningkatan kualitas fisik dan mental penduduk yang diperoleh melalui proses pembangunan diberbagai bidang. Pembangunan manusia sebagai subsistem pembangunan diharapkan dapat menimbulkan keragaman dan diversifikasi dalam kegiatan masyarakat. Makin beragam kegiatan masyarakat makin besar pula kemampuan mereka dalam mengembangkan pilihan-pilihannya. Disisi lain, pengembangan sumber daya manusia akan dapat meningkatkan usaha ekonomi masyarakat

melalui kemampuan mengelola sumber daya untuk memperoleh hasil yang optimal.

Dalam konteks pembangunan daerah, IPM dijadikan sebagai salah satu ukuran utama dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah yakni menjadi kunci bagi terlaksananya perencanaan pembangunan daerah. Pertimbangan lain adalah IPM dapat digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah yaitu sebagai alat ukur pemantauan status pembangunan manusia, karena IPM sangat sensitif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi.

Pendekatan hak dalam pembangunan manusia selaras dengan pengembangan dan prakarsa Strategi Penghapusan Kemiskinan (Bebas Kemiskinan) atau Program Strategi Penghapusan Kemiskinan Nasional (SPKN) di tingkat Nasional, dan upaya-upaya untuk mencapai tujuan pembangunan Milenium (MDGs)

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan mengenai Indeks Pembangunan Manusia Kota Bontang 2017 adalah:

1. Angka IPM pada tahun 2017 mengalami perubahan metodologi penghitungan, alasannya adalah (1) beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan serta PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah, (2) Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

2. Melalui penghitungan IPM metode baru, Kota Bontang menjadi daerah di Kalimantan Timur dengan IPM tertinggi sejak 2011 hingga 2017 dengan nilai IPM yang terus meningkat. Selama periode tersebut IPM Kota Bontang telah naik dari 77,25 di tahun 2011 menjadi 79,47 di tahun 2017 atau naik sebesar 2,22 poin.
3. Seluruh komponen IPM Kota Bontang di tahun 2017 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2016. Peningkatan AHH, AHLS, RLS, dan Pengeluaran perkapita masing-masing sebesar 0,01 persen, 0,7 persen, 2,98 persen, dan 0,7 persen. Kenaikan ini bisa menjadi indikasi bahwa pembangunan di Kota Bontang terus berjalan baik di bidang kesehatan, pendidikan, maupun perekonomian.
4. Peningkatan angka harapan hidup di Kota Bontang menunjukkan taraf kesehatan penduduk Kota Bontang yang makin baik. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari peranan pemerintah yang memberikan pelayanan kesehatan gratis melalui program jamkesda dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya secara dini.

5.2 SARAN

Capaian IPM Kota Bontang di tahun 2017 masih menggembirakan karena menempati posisi teratas di Kalimantan Timur. Kota Bontang unggul dalam pencapaian rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan. Tidak bisa dipungkiri bahwa pengeluaran

riil perkapita Kota Bontang merupakan dampak dari keberadaan dua industri pengolahan berskala internasional di Kota Bontang. Hingga saat ini kedua industri tersebut memiliki kontribusi terbesar dalam perekonomian Kota Bontang yang pada tahun 2017 mencapai 83,95 persen. Dominasi industri ini harus menjadi perhatian pemerintah karena keduanya mengandalkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga menggerakkan perekonomian dari sektor-sektor lain harus mulai dilakukan.

Capaian IPM Kota Bontang dalam bidang kesehatan yang tercermin dalam angka harapan hidup (AHH) masih berada di bawah Kota Balikpapan. Meskipun sudah cukup tinggi, tetapi gerakan-gerakan untuk meningkatkan usia hidup seseorang perlu terus dilakukan. Tentunya tidak hanya berumur panjang tetapi juga sehat dan bisa aktif dalam masyarakat. Peningkatan AHH merupakan keberhasilan dalam menurunkan Angka Kematian Bayi (IMR). Semakin rendah IMR maka AHH akan semakin tinggi. Upaya yang dapat dilakukan dalam menurunkan IMR adalah menjaga kesehatan lingkungan, sanitasi, kualitas sumber air, dan perilaku hidup bersih. Selain itu penyediaan fasilitas kesehatan yang lengkap dan terjangkau. Upaya tak kalah penting adalah menumbuhkan kesadaran di masyarakat pentingnya kesehatan untuk masa depan yang lebih baik.

Meningkatnya angka harapan hidup juga menjadi tantangan bagi Pemerintah terutama dalam penyediaan fasilitas yang ramah pada usia lanjut. Sehingga peningkatan AHH tidak dianggap menjadi tambahan beban bagi masyarakat. Sebagaimana disebutkan pada bagian

sebelumnya gerakan investasi/menabung di masa muda harus menjadi kebiasaan, sehingga pada masa tua bisa hidup mandiri secara ekonomi dan tidak lagi terlalu tergantung pada orang lain.

Pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi, namun tidak berarti anti pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir. Perhatian pembangunan manusia tidak hanya terfokus pada laju pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada aspek pendistribusiannya. Jadi bukan hanya masalah berapa besar pertumbuhan ekonomi, tetapi pertumbuhan yang seperti apa. Perhatian harus lebih ditujukan pada struktur dan kualitas pertumbuhan tersebut, sehingga dapat menjamin bahwa pertumbuhan diarahkan untuk mendukung perbaikan kesejahteraan manusia baik bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Perhatian utama dari kebijakan pembangunan haruslah ditekankan pada bagaimana keterkaitan tersebut dapat diciptakan dan diperkuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (2016). *Siaran Pers: Menteri Sofyan: Indonesia Siap Mengimplementasikan SDGs*. Diakses tanggal 12 Mei 2017
<http://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/siaran-pers-menteri-sofyan-indonesia-siap-mengimplementasikan-sdgs/>
- Badan Pusat Statistik. *Indeks Pembangunan Manusia*.
<http://ipm.bps.go.id/page/ipm>. Diakses tanggal 12 Juni 2018.
- _____. 2010. *Indeks Pembangunan Manusia (2007-2008)*. Jakarta: CV. Nario Sari.
- _____. 2011. *Indeks Pembangunan Manusia 2009-2010*. Jakarta: CV. Nario Sari.
- United Nations Development Programme (1990). *Human Development Report 1990*. Washington DC, USA: UNDP.
- United Nations Development Programme (2015). *Human Development Report 2015*. Washington DC, USA: UNDP.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BONTANG**

Jl. Awang Long No. 02 RT 08 Kota Bontang
Telp. (0548)26066 fax. (0548)27706
Email: bps6474@bps.go.id Homepage: <http://bontangkota.bps.go.id>

ISBN 978-602-5502-14-9



9 786025 502149